

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Organisasi nirlaba merupakan organisasi non profit atau organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Organisasi nirlaba sendiri berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan pokok dari organisasi ini yaitu untuk mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, contoh organisasi nirlaba meliputi gereja, masjid, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yayasan, partai politik dan lembaga zakat. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para peyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan. Akibat dari karakteristik tersebut, pada organisasi nirlaba timbul transaksi yang jarang ada atau tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis lainnya yaitu misalnya penerimaan sumbangan.

Pada umumnya tuntutan untuk menyajikan dan memberikan informasi keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis saja, namun organisasi non bisnis (organisasi nirlaba) juga dituntut untuk dapat memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal. IAI 2009 mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Proses pelaporan ini secara umum bertujuan untuk

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan atau organisasi terkait yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, seperti donatur, yayasan, kreditur, anggota organisasi dan pihak lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik sangatlah penting terutama pada organisasi nirlaba. Penyajian laporan pada organisasi ini mempunyai standart tersendiri, yaitu Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Dengan adanya standart yang diatur dalam PSAK No. 45 tersebut, membuat penyajian laporan keuangan pada organisasi nirlaba lebih akuntabel dan transparansi bagi para pengguna. Sehingga para pengguna dapat melihat hasil aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai dan sebagai bukti atas pertanggungjawaban dari dana yang sudah diberikan oleh donatur.

Salah satu contoh dari organisasi sektor publik terutama organisasi nirlaba adalah yayasan. Pengertian Yayasan Menurut UU No. 16 Tahun 2001, merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Tujuan yayasan adalah melakukan aktifitas-aktifitas yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan. Setiap yayasan harus memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh

yayasan. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari jumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu sumber pembiayaan yayasan juga berasal dari sumbangan dan bantuan yang diberikan para donatur.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas, misalnya pembuatan keputusan tentang anggaran dasar, mengangkat dan menghentikan pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan serta tentang penggabungan atau pembubaran yayasan. Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum, yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam melakukan kegiatan yayasan.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Jannah Karanggondang Mlonggo Jepara merupakan contoh dari organisasi nirlaba, karena organisasi ini tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari kegiatan yang dijalankan. Yayasan pendidikan ini terdiri dari RA, TPQ dan MI. Seperti halnya organisasi bisnis dan organisasi nirlaba lainnya, sebuah yayasan juga dituntut untuk dapat menyajikan dan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan yaitu pihak internal maupun pihak eksternal.

Pada sebuah yayasan pasti memiliki rencana anggaran yayasan, rencana anggaran pada yayasan umumnya bersifat terbuka, yaitu harus dipublikasikan kepada masyarakat agar dapat dikritisi dan didiskusikan. Seperti organisasi nirlaba lain yayasan juga menyusun laporan keuangan yang harus disesuaikan dengan PSAK No 45. Namun pada kenyataannya tidak semua organisasi nirlaba terutama yayasan menggunakan PSAK No 45 sebagai pedoman atau acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Bahkan Masih banyak organisasi nirlaba yang pembuatan pelaporan keuangannya masih sangat sederhana dan hanya sebatas pengeluaran kas dan penerimaan kas.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO 45 PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-JANNAH KARANGGONDANG MLONGGO JEPARA.

1.2 Ruang Lingkup (batasan masalah)

Penelitian ini hanya meneliti tentang penerapan laporan keuangan pada yayasan pendidikan islam al-jannah karanggondang mlonggo jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada yayasan pendidikan islam al-jannah karanggondang mlonggo jepara.

2. Bagaimana kesesuaian penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada yayasan pendidikan islam al-jannah karanggondang mlonggo jepara dengan PSAK No 45.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Jannah Karanggondang Mlonggo Jepara. Dan Bagaimana kesesuaian penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Jannah Karanggondang Mlonggo Jepara dengan PSAK No 45.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Bagi Yayasan Pendidikan Islam Al-Jannah

Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 tentang penungkapan dan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba, pada yayasan pendidikan islam al-jannah karanggondang mlonggo jepara.

2. Bagi Pembaca

a. Sebagai sumber informasi tentang pelaporan keuangan yayasan kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang dilakukan oleh yayasan.

b. Untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi organisasi nirlaba, terutama tentang pelaporan keuangan yayasan berdasarkan pedoman yaitu PSAK No. 45.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi yang dapat berguna untuk kepentingan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU).

4. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI) pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) dan sebagai sarana mempraktikkan ilmu teori yang sudah dipelajari dan didapatkan selama kuliah.

